

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI BENCANA KEKERINGAN DI DESA KEMBANG KUNING KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA

Dzikri Fadhillah Rahman¹⁾, Lukman Munawar Fauzi²⁾, Waluyo Zulfikar³⁾

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam menanggulangi bencana kekeringan di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi langkah-langkah strategis pemerintah desa, meliputi fungsi sebagai fasilitator, katalisator, regulator, dan dinamisator. Pemerintah desa menyediakan infrastruktur air bersih, melakukan sosialisasi pengelolaan air, menetapkan kebijakan mitigasi, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi dampak kekeringan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berhasil meningkatkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, teknologi sederhana, dan kesadaran masyarakat yang belum optimal. Faktor pendorong keberhasilan meliputi alokasi dana desa yang memadai, dukungan pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat. Namun, hambatan seperti keterbatasan anggaran dan akses yang sulit ke beberapa wilayah menghambat efektivitas program.

Penelitian ini menegaskan pentingnya perencanaan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana kekeringan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa lain untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan serupa.

Kata Kunci: Bencana Kekeringan, Pemerintah Desa, Mitigasi Bencana, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

This research aims to analyze the role of the village government in overcoming the drought disaster in Kembang Kuning Village, Jatiluhur District, Purwakarta Regency. Using a descriptive qualitative approach, this research identifies the strategic steps of the village government, including functions as facilitator, catalyst, regulator and dynamist. The village government provides clean water infrastructure, socializes water management, establishes mitigation policies, and collaborates with various parties to overcome the impacts of drought.

The research results show that the village government has succeeded in increasing the availability of clean water for the community even though it still faces challenges such as limited infrastructure, simple technology, and suboptimal public

awareness. Factors driving success include adequate village fund allocation, local government support, and community participation. However, obstacles such as budget limitations and difficult access to some areas hinder the effectiveness of the program. This research emphasizes the importance of data-based planning, cross-sector collaboration, and community empowerment in managing drought disasters. It is hoped that these findings can become a reference for other village governments to develop more effective strategies in facing similar challenges.

Keywords: Drought Disaster, Village Government, Disaster Mitigation, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Letak geografis Indonesia diantara dua benua, dan dua samudra serta terletak di sekitar garis khatulistiwa merupakan faktor klimatologis penyebab banjir dan kekeringan di Indonesia. Posisi geografis ini menyebabkan Indonesia berada pada belahan bumi dengan iklim monsoon tropis yang sangat sensitif terhadap anomali iklim El-Nino Southern Oscillation (ENSO). ENSO menyebabkan terjadinya kekeringan apabila kondisi suhu permukaan laut di Pasifik Equator bagian tengah hingga timur menghangat (El Nino).

Menurut Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mendefenisikan Kekeringan adalah ketersediaan air air yang jauh dibawa kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia BNPB, (2012). Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan pentingnya upaya mengurangi dampak bencana, termasuk kekeringan. Pasal 1 ayat (6) dalam undang-undang menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi serangkaian upaya seperti penetapan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan risiko bencana, pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi setelah bencana terjadi. Selain itu, Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menetapkan bahwa desa harus mampu mengelola risiko bencana secara mandiri untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007.

Kekeringan adalah suatu bencana yang biasanya terjadi selama musim kemarau yang berkepanjangan. Selain faktor alam, kekeringan juga dapat

diperparah oleh kurangnya pengelolaan sumber daya air yang efektif oleh masyarakat setempat. Kegagalan dalam mengelola prasarana dan sumber daya air, seperti mata air atau sungai, bisa memperburuk kondisi kekeringan. Dampak dari kekeringan sangat luas dan merentang lintas sektor, mencakup aspek ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. kekeringan menjadi bencana yang kompleks untuk diatasi, karena pengaruhnya menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memerlukan pendekatan penanggulangan yang menyeluruh. Dampak kekeringan merambah ke sektor-sektor lain, termasuk kesehatan dan pendidikan. Kurangnya air bersih dapat memperburuk kondisi sanitasi dan meningkatkan risiko penyakit yang berhubungan dengan air. Selain itu, kekeringan dapat mempengaruhi kualitas pendidikan karena anak-anak mungkin terpaksa membantu keluarga mereka dalam usaha pertanian atau mencari air, sehingga mengganggu proses belajar mereka. Kekeringan di Indonesia umumnya diperparah oleh faktor-faktor lainnya, seperti perubahan iklim global yang mengakibatkan pola curah hujan yang semakin tidak menentu dan ekstrem

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengatasi dampak kekeringan. Peran tersebut meliputi identifikasi wilayah rawan kekeringan, penyediaan infrastruktur air bersih, peningkatan kesadaran masyarakat, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam menanggulangi bencana kekeringan, faktor pendorong dan penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan

tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemerintah desa lain dalam merumuskan strategi penanggulangan bencana kekeringan yang efektif

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif Sugiyono, p. (2017). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendala mengenai peran pemerintah desa dala menanggulangi bencana kekeringan, serta menganalisis langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya air dan pemberdayaan masyarakat. Teknik Pengumpulan Data dengan menggunakan metode wawancara dan observasi Miles, B. M. (1992). Wawancara dilakukan dengan pemerintah desa, masyarakat, dan pihak-pihak yang relevan untuk mendapatkan informasi mengenai strategi dan kendala dalam penanggulangan kekeringan. Observasi yang mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi wilayah yang terdampak kekeringan serta langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa. Teknik Analisia data yang digunakan yaitu model analisis interaktif miles dan huberan yang encakup reduksi data penyajian data serta penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Jatiluhur adalah sebuah kecamatan dikabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang mana Kecamatan Jatiluhur terdiri atas 10 desa dengan memiliki total 17.338 Rumah dan total 618 Rumah tak Layak Huni, dari setiap kelurahan / desa tersebut memiliki 61 RW dan 206 RT. Berdasarkan profil desa yang dibuat setiap tahun, semua desa di Kecamatan Jatiluhur adalah Desa Swakarya. Dikelilingi oleh bendungan atau waduk yang merupakan sumber utama pasokan air untuk air minum, Irigasi dan yang paling utama adalah sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk daerah Jabodetabek dan sekitarnya, disamping itu merupakan tempat pembudidayaan ikan kolam terapung atau keramba.

Peran pemerintah desa dalam menanggulangi bencana kekeringan Pemerintah Desa Kembang Kuning memiliki peran penting dalam

menanggulangi bencana kekeringan Muhadam Labolo (2010). Berdasarkan penelitian yang dilakukan peran yang mencakup :

1. Fasilitator

Yaitu peran sebagai fasilitator atau memberikan fasilitas kepada masyarakat yang terkena dampak kekeringan. Regulator merupakan suatu aturan yang menjadi sebuah acuan juga pandangan dalam mengatur suatu kegiatan yang telah direncanakan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Peraturan yang baik dapat terjalin antara pihak Pemerintah Desa dan Masyarakat dapat di ukur dari hasil wawancara dengan Pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk acuan yang baik untuk menjalankan aturan agar terlaksananya peran Pemerintah Desa dalam menanggulangi Bencana Kekeringan.

2. Dinamisor

Dinamisor merupakan peran sebagai suatu perantara atau jembatan untuk merealisasikan hasil-hasil dan rencana yang sudah ada yang sudah di buat sebelumnya. Peran sebagai suatu perubahan dan penggerak pembangunan di desa antara Pemerintah Desa dengan masyarakat untuk menanggulangi Bencana kekeringan yang berkepanjangan. Kesimpulan dari penelitian ini Pemerintah Desa Kembang kuning Telah mengirimkan permohonan bantuan Kepada pihak PJT dan PDAM untuk mengirimkan Bantuan air bersih Melalui kendaraan mobilisasi 8000 liter air bersih untuk Masyarakat yang Mengalami Bencana kekeringan di Desa Kembang kuning.

3. Katalisator

Katalisator adalah peran pendorong atau penggerak utama dalam menciptakan perubahan dan mempercepat upaya penanggulangan bencana kekeringan. Untuk membangun kemitraan dengan (pemerintahan Kabupaten/kota, pihak swasta dan masyarakat sipil) untuk mempercepat penanggulangan bencana. Dengan cara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan air yang efisien serta mendorong masyarakat untuk menggunakan

teknologi konservasi air, seperti penampungan air hujan. Serta hasil penelitian ini Pemerintah Desa sudah mampu berperan sebagai katalisator karena sudah berhasil menjadi jembatan antara masyarakat, perusahaan, lembaga Pemerintah seperti Pdam dan PJT dan lembaga terkait lainnya, dengan melakukan koordinasi yang baik, bantuan dan sumber daya dapat di salurkan secara efektif, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan kekeringan

4. Regulator

Peran sebagai regulasi yang dapat menjadi acuan peraturan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dan masyarakat dalam menjalankan kegiatannya agar sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya dalam pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa sudah bisa mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya air, mengalokasikan anggaran desa untuk mitigasi kekeringan, menyusun rencana penanggulangan bencana berbasis komunitas.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam menanggulangi Bencana Kekeringan di Desa Kembang kuning yaitu sudah menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kekeringan yang dilakukan pemerintah Desa, Kembang kuning telah memberikan dampak positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Perbaikan infrastruktur air telah meningkatkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, namun upaya sosialisasi dan perubahan perilaku masyarakat dalam menghemat air masih perlu ditingkatkan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kekeringan di Desa Kembang kuning kecamatan jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

Dalam menanggulangi kekeringan di perlukan partisipasi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu Meningkatkan Partisipasi masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa dalam menanggulangi bencana di desa sangat baik

pemerintah desa mengumpulkan masyarakat agar saling bersilahturahmi antar warga dan saling bergotong royong dalam menanggulangi bencana kekeringan serta hasil dari observasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat penanggulangan kekeringan yang dilakukan pemerintah Desa, Kembang kuning telah memberikan dampak cukup baik , meskipun masih terdapat beberapa kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat di Pelosok pelosok desa, maka dari itu kordinasi antara pihak swadaya masyarakat harus lebih di tingkatkan agar masyarakat bisa lebih ikut berpartisipasi dalam menanggulangi bencana Kekeringan di desa kembang kuning kecamatan Jatiluhur kabupaten Purwakarta.

Faktor mempengaruhi keberhasilan Pemerintah Desa dalam menanggulangi bencana kekeringan di Desa kembang kuning yaitu Dari Perencanaan yang matang dan berbasis data adalah kunci keberhasilan. Pemerintah Desa melakukan pemetaan wilayah yang rawan kekeringan, mengidentifikasi sumber-sumber air potensial, dan menyusun program yang sesuai dengan kondisi desa kembang kuning. Dengan perencanaan yang baik, kami dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan tepat sasaran dan kami Berkerjasama dengan Pihak pemerintah daerah seperti PDAM, PJT dan Perusahaan swasta PT Indorama yang ikut membantu dalam keberhasilan pemerintah desa kembang kuning dan dari partisipasi Masyarakat yang selalu mengikuti program sosialisasi dan ikut gotong royong untuk keberhasilan Pemerintah desa Dalam menanggulangi Bencana kekeringan di Desa kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa Kembang Kuning memiliki peran yang strategis dalam menanggulangi bencana kekeringan di wilayahnya. Peran ini dijalankan melalui fungsi sebagai fasilitator, katalisator, regulator, dan dinamisator. Sebagai fasilitator, pemerintah desa menyediakan infrastruktur air bersih seperti sumur bor dan jaringan distribusi air. Sebagai katalisator, desa mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi air melalui sosialisasi dan pelatihan. Sebagai regulator, pemerintah desa menetapkan kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk mitigasi kekeringan, sementara sebagai dinamisator, desa menggalang kolaborasi dengan

pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan kekeringan.

Meskipun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya penggunaan teknologi, dan kurangnya kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air. Upaya yang telah dilakukan menunjukkan dampak positif, terutama dalam meningkatkan akses terhadap air bersih, namun upaya sosialisasi dan perubahan perilaku masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Keberhasilan penanggulangan kekeringan di Desa Kembang Kuning sangat bergantung pada perencanaan yang matang, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa lainnya dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif, khususnya dalam menghadapi tantangan kekeringan.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. (2012). *Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Miles, B. M. (1992). *Analisis Data Kuantitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Muhadam Labolo. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, p. (2017). *metode kuantitatif, kualitatif, dan RD*. Bandung: ALFABETA,cv.
- Burhan Bungin, S. M. (2011). *Metodologi penelitian kuantitatif: komunikasi, ekonomi dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*. Depok: Prenadamedia Group.
- Lexy J. Moleong, M. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.